

KEBIJAKAN EKONOMI: PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK DALAM PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Ayu Pratiwi^{a,1,*}

^aInstitut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

¹pratiwiayu2501@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Kebijakan Ekonomi
Neoliberalisme

Kebijakan ekonomi nasional lebih banyak dibimbing oleh paham-paham neoliberalisme. Dimana, kepentingan kesejahteraan masyarakat lebih berada dibelakang kepentingan elit-elit ekonomi nasional maupun para pemodal asing. Neoliberalisme tidak lain adalah kapitalisme dengan spirit yang lebih progresif. Kajian analisis ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana kebijakan ekonomi sebagai suatu entitas yang sangat menentukan pada system perpolitikan yang ada dan pembangunan nasional sebagai entitas lainnya memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Masuknya neoliberalisme dengan orientasi kapitalis untuk mampu menguasai berbagai aspek ekonomi dan politik. Perpindahan rezim dari Orde Baru yang berwatak diktator ke rezim-rezim reformasi tidak punya arti apa-apa dilihat dari sisi hubungan antara negara dan modal. Fungsi kedua rezim sebagai pengurus kepentingan kaum borjuis tetap saja berlangsung, dengan melakukan apapun agar pengerukan kekayaan dapat terus bekerja

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



A. PENDAHULUAN

Indonesia di bawah pemerintahan Jendral Soeharto, kerap kali dipandang sebagai salah satu kisah sukses pembangunan yang kapitalistik, sebelum krisis ekonomi dan krisis politik tahun 1997-1998. Kisah pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat selama tiga puluh tahun, pemerintahan orde baru dianggap sukses dalam menurunkan angka kemiskinan yang justru ketika itu mendera banyak negara di Asia. Bahkan World Bank pun dalam laporannya tahun 1997 menyatakan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus dalam periode tahun 1991-1996, Indonesia diperkirakan masih akan mengulangi kesuksesan pertumbuhan yang menggembirakan. Penyebabnya adalah pertumbuhan industri manufaktur (dalam skala besar-besaran) dengan upah buruh murah dan pertumbuhan industri berbasis sumber daya alam. Keduanya menjadi kondisi yang berhasil untuk menggambarkan kemampuan konsolidasi sistem kapitalisme di Indonesia.

Dalam keyakinan beberapa studi kontemporer, seperti studi-studi Hadiz & Robison dan Rosser memberi indikasi tentang paham neoliberal telah masuk dalam kebijakan sejak rezim Orde Baru hingga rezim-rezim yang terbentuk sesudahnya. Apa yang harus digarisbawahi adalah bahwa kebijakan-kebijakan neoliberal memang tidak turun secara serempak, tetapi melalui proses evolusi yang panjang, yang bisa

ditelusuri dari berbagai kebijakan reformasi ekonomi sejak kelahiran Orde Baru. Apa yang disebut sebagai deregulasi dan debirokratisasi sejak era 1980an, menyusul kejatuhan harga minyak, adalah bukti reformasi pasar itu, dan kebijakan itu berlangsung semakin dalam setelah krisis ekonomi dan politik tahun 1997-1998.

Kebijakan-kebijakan itu di antaranya adalah reformasi pasar modal, keuangan dan perbankan, perdagangan dan investasi, dan hak milik intelektual. Seperti Chili, Indonesia kembali memulai ekonomi pasar yang ditandai dengan jatuhnya pemerintahan orde lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan digantikan oleh pemerintahan orde baru. Apa yang terjadi adalah lahirnya sebuah rezim kapitalis, di mana ide-ide neoliberal yang secara perlahan mulai dipraktekkan, misalnya, dengan membuka pintu secara lebar bagi investasi swasta asing.

Keajaiban pertumbuhan ekonomi di masa Orde Baru berlangsung di bawah rezim yang mengandalkan kekuatan militer dalam semua segi kehidupan. Rezim sukses membongkar organisasi-organisasi buruh dan tani, menciptakan stigma komunis, dan melakukan kekerasan dan teror terhadap perlawanan kaum buruh dan kaum tani yang meningkat tajam sejak 1980an (Hadiz, 1997). Penggunaan kekerasan juga dilakukan terhadap kelompok-kelompok miskin perkotaan, dengan melakukan pengusuran secara paksa (Benyamin & Kartini, 1998) dan bahkan melakukan pembunuhan ekstra legal terhadap warga perkotaan yang diklaim sebagai penjahat (Cribb, 2000). Kondisi seperti ini sejalan dengan kepentingan modal internasional yang tidak berkeinginan mendukung proses demokratisasi di Indonesia (Winters, 1999). Tentu saja, semasa Orde Baru, Indonesia menjadi contoh yang penting, di mana tidak ada hubungan antara kapitalisme dan demokrasi.

Reformasi politik dan reformasi ekonomi setelah kejatuhan Soeharto melahirkan banyak ketegangan. Baik proses demokratisasi di bidang politik, maupun reformasi pasar yang memberikan kemudahan akses perusahaan-perusahaan swasta untuk mengeruk sumber daya alam dengan jaminan hak milik yang lebih kuat, semakin memperluas konflik dan kekerasan. Dalam kerangka ini, kekerasan berbasis suku dan agama yang muncul menjelang kejatuhan Soeharto dan kemudian menyebar ke Maluku, Maluku Utara, Kalimantan, dan Poso setelah reformasi (Klinken, 2007), sebenarnya hanya bisa dijelaskan dengan baik melalui lensa yang lebih luas. Krisis ekonomi sejak 1997 mengakibatkan merosotnya kesejahteraan penduduk, akibat pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur, konstruksi, dan pelayanan terutama di daerah perkotaan (Wie, 2002) menciptakan efek domino konflik dan kekerasan.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan pada latar belakang di atas maka analisis ini memiliki perumusan masalah bagaimana kebijakan ekonomi perspektif ekonomi politik dalam pembangunan di Indonesia., sehingga tujuan utama dari analisis ini adalah untuk melakukan analisis mendalam melalui pendekatan fenomenologi tentang Bagaimana sistem neoliberalisme diterapkan di Indonesia dan apa dampaknya bagi demokratisasi. kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dan kaitannya dengan kekuatan neoliberalisme yang memiliki peranan kuta dalam melakukan intervensi kebijakan strategis yang dibuat oleh pemerintah.

B. METODE

Kajian analisis ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana kebijakan ekonomi sebagai suatu entitas yang sangat menentukan pada system perpolitikan yang ada dan pembangunan nasional sebagai entitas lainnya memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Masuknya neoliberalisme dengan orientasi kapitalis untuk mampu menguasai berbagai aspek ekonomi dan politik. Pemerintahan neoliberal di Indonesia berlangsung sejak awal pemerintahan dibawah kekuasaan Orde Baru hingga saat ini. Sepanjang itu, pemerintahan neoliberal mengukir prestasi meningkatkan hutang negara dua kali lipat dalam waktu 10 tahun dari US\$ 67,3 miliar menjadi US\$ 65,7 miliar untuk hutang bilateral/multilateral dan Rp 972,2 triliun dalam bentuk hutang obligasi. Karenanya, pemerintahan Soerharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY-JK, hingga pemerintahan saat ini dibawah kepemimpinan Jokowi menjadi bagian tidak terpisahkan dari penerapan kebijakan ekonomi neoliberal.

C. Kajian Teoritis dan Model Konseptual

Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik akhir-abad kedua puluh, sebenarnya merupakan redefinisi dan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik yang mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan mengarah pada penciptaan Distorsi dan *High Cost Economy* yang kemudian akan berujung pada tindakan koruptif (Wikipedia.com).

Secara sederhana, neoliberalisme dapat didefinisikan sebagai “... *an updated version of classical political economy that was developed in the writings of free-market economists...*”. Definisi yang lebih lengkap dari neoliberalisme dapat ditemukan pada pendapat Balaam dan Veseth yang memaknai neoliberalisme sebagai “*a viewpoint that favors a return to the economic policies advocated by classical liberals such as Adam Smith and David Ricardo. Neoliberalism emphasizes market deregulation, privatization of government enterprises, minimal government intervention, and open international markets. Unlike classical liberalism, neoliberalism is primarily an agenda of economic policies rather than a political economy perspective*”. Dari definisi tersebut, tampak bahwa neoliberalisme merupakan gagasan yang terkait dengan upaya untuk kembali pada kebijakan ekonomi liberal klasik yang diusung oleh Adam Smith dan David Ricardo.

Neoliberalisme dengan demikian dicirikan dengan gagasan yang lebih menekankan pada deregulasi pasar, privatisasi badan usaha milik negara, campur tangan pemerintah yang terbatas, serta pasar internasional yang lebih terbuka. Namun, berbeda dengan liberalisme klasik yang diperkenalkan oleh Adam Smith dan David Ricardo, neoliberalisme lebih merupakan kebijakan ekonomi daripada sekedar sebuah perspektif ekonomi politik.

Gagasan neoliberalisme berakar pada tradisi pemikiran liberal yang menempatkan individualisme, rasionalitas, kebebasan, dan equality sebagai nilai-nilai yang paling

mendasar. Asumsi-asumsi Dasar Liberalisme : pertama, Individualisme yang menyiratkan bahwa manusia sebagai individu merupakan hal yang paling mendasar dalam pandangan kaum liberal. Karena hakekat manusia merupakan makhluk yang penuh damai dan mempunyai kemauan bekerja sama, kompetitif secara konstruktif, dan rasional. Kedua, Equality yang berarti pengakuan setiap individu lahir dengan posisi yang setara. Namun setiap individu mempunyai kemampuan dan kemauan yang berbeda-beda. Karenanya kaum liberal percaya akan adanya ‘*equality of opportunity*’ yang memberikan setiap individu kesempatan yang sama untuk mewujudkan potensi mereka masing-masing. Ketiga, Kebebasan individu untuk mencapai apa yang terbaik bagi dirinya perlu mendapat jaminan. Kebebasan individu tersebut dijamin melalui mekanisme pasar [*invisible hand*-Adam Smith]. Keempat, Peran negara minimalis: peran negara yang kuat dan aktif dapat mengancam kebebasan individu karenanya campur tangan negara dalam pasar akan merugikan masyarakat. Kaum Liberal memandang ketegangan laten antara negara dan pasar merupakan konflik antara penindasan dan kebebasan, kekuasaan dan hak individu, dogma otokratik dan logika rasional.

Kebangkitan kembali liberalisme klasik dapat ditelusuri lewat pemikiran dua pemenang nobel Friedrich von Hayek (1899 – 1992) dan Milton Friedman (1912 - 2006). Upaya pengembalian pemikiran liberalisme klasik ini tidak hanya berhenti pada tataran ide. Gagasan tersebut kemudian tertuang dalam kebijakan-kebijakan ekonomi politik domestik di Inggris di bawah perdana menteri Margaret Thatcher dan pada saat yang hampir bersamaan diterapkan oleh Ronald Reagan di AS. Sehingga kemunculan neoliberalisme kerap disepadankan dengan neokonservatisme mengingat kebangkitannya di Inggris melekat pada Thatcher yang berasal dari partai konservatif. Tidak berhenti sampai disitu, dengan disponsori oleh Inggris dan AS, di tingkat global gagasan neoliberalisme juga menjadi landasan dalam diplomasi ekonomi internasional yang tercermin dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh lembaga-lembaga ekonomi internasional seperti IMF, WTO, dan Bank Dunia. Gagasan-gagasan neoliberal sebagaimana dipraktekkan di Inggris dan AS serta yang diadopsi dalam sejumlah kebijakan lembaga ekonomi internasional tersebut dikemas dalam resep yang oleh John Williamson (1993) sebagai *Washington Consensus*.

Pokok-pokok pemikiran neo-liberalisme mengandung (www.nefos.org) :

(1) Kekuatan pasar, yang artinya membebaskan usaha "bebas" atau usaha swasta dari ikatan apa pun yang diterapkan oleh pemerintah (negara) tak peduli seberapa besar kerusakan sosial yang diakibatkannya. Keterbukaan yang lebih besar bagi perdagangan internasional dan investasi, seperti NAFTA. Menurunkan upah dengan cara melucuti buruh dari serikat buruhnya dan menghapuskan hak-hak buruh yang telah dimenangkan dalam perjuangan bertahun-tahun di masa lalu. Tidak ada lagi kontrol harga. Secara keseluruhan, kebebasan total bagi pergerakan kapital, barang dan jasa. Untuk meyakinkan kita bahwa semua ini baik untuk kita, mereka mengatakan bahwa "pasar yang tak diregulasi adalah cara terbaik meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang akhirnya akan menguntungkan semua orang." Itu seperti ekonomi "sisi persediaan" (*supply-side*) dan "tetesan ke bawah" (*trickle-down*) yang dijalankan Reagan tapi kekayaannya sedemikian rupa tidak banyak menetes.

(2) Memangkas pembelanjaan public untuk layanan social seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Mengurangi jaringan pengamanan bagi kaum miskin, dan bahkan biaya perawatan jalanan, jembatan, persediaan .

(3) Deregulasi dengan mengurangi regulasi pemerintah terhadap segala hal yang dapat menekan profit, termasuk perlindungan lingkungan hidup dan keamanan tempat kerja.

(4) Privatisasi dengan menjual perusahaan-perusahaan, barang-barang, dan jasa milik negara kepada investor swasta. Ini termasuk bank, industri kunci, perkeretaapian, jalan tol, listrik, sekolah, rumah sakit dan bahkan air bersih. Walau biasanya dilakukan atas nama efisiensi yang lebih besar, yang sering dibutuhkan, privatisasi terutama berdampak pada pengonsentrasian kekayaan kepada pihak yang jumlahnya semakin sedikit dan menjadikan khalayak umum harus membayar lebih untuk kebutuhannya.

(5) Menghapus konsep barang milik "publik" atau "komunitas" dan menggantikannya dengan "tanggung-jawab individu." Menekan rakyat yang termiskin dalam masyarakat untuk mencari solusi sendiri terhadap minimnya layanan kesehatan, pendidikan dan keamanan sosial mereka kemudian menyalahkan mereka, bila gagal, karena "malas."

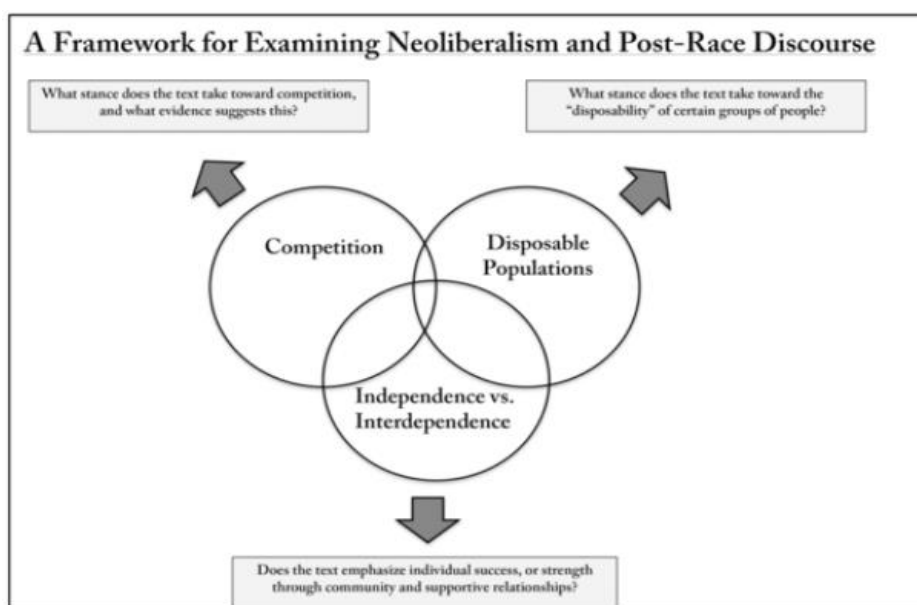
Ketika gagasan neoliberalisme dituangkan dalam bentuk resep kebijakan inilah, ia kemudian dianggap sebagai satu-satunya jalan menuju kemakmuran. Pada titik ini para pengusungnya meyakini bahwa tidak ada jalan lain di luar neoliberalisme untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. *There is no alternative* (TINA) jargon yang diperkenalkan oleh *Thatcher* menandai nilai yang dianut the *Iron Lady* dari Inggris tersebut terhadap kemandirian resep neoliberal. Kegagalan sosialisme seiring dengan runtuhnya Uni Sovyet pada awal tahun 1990-an seolah meneguhkan pandangan tersebut. Kevakuman ideologi pasca runtuhnya Uni Sovyet memberi ruang bagi para pengusung gagasan neoliberalisme untuk mengintensifkan ide-ide pro pasar bebas mereka. Melalui berbagai lembaga-lembaga ekonomi internasional gagasan gagasan neoliberal dipaksakan penerapannya secara global.

Di sektor perdagangan, kelahiran *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1994 yang menggantikan rezim perdagangan sebelumnya di bawah GATT, secara gamblang meninggalkan prinsip *embedded liberalism* yang sarat dengan ide Keynesian menuju penerapan neoliberalisme yang dilandasi semangat pro pasar dan pengkerdilan peran negara. Di sektor finansial, rezim finansial internasional di bawah IMF mengkampanyekan ide-ide neoliberal lewat penerapan *Structural Adjustment Program* (SAP)-nya yang mensyaratkan sejumlah perubahan-perubahan struktural ketika suatu negara membutuhkan pinjaman dari lembaga tersebut. Keberhasilan kampanye kebijakan neoliberal ditandai dengan kecenderungan negara-negara berkembang yang mengadopsi resep-resep *Washington Consensus* sebagai landasan kebijakan ekonomi politik mereka. Krisis finansial yang melanda Asia Timur pada pertengahan tahun 1990-an kembali melegitimasi superioritas neoliberalisme. Krisis finansial tersebut seakan menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi yang dicapai lewat kuatnya peran negara melalui kebijakan *developmental state* tidak mampu bertahan lama dan justru berakhir dengan krisis.

Namun, benarkah janji-janji neoliberalisme beserta perangkat kebijakannya mampu terwujud? Disinilah kontroversi terhadap neoliberalisme muncul. Sejumlah studi

menunjukkan penerapan resep neoliberalisme justru memunculkan degradasi dalam segala aspek kehidupan. Kebijakan neoliberal dianggap tidak hanya menggerogoti kedaulatan negara namun pada saat bersamaan telah memberikan kekuasaan kepada perusahaan multinasional dengan kekuatan modal mereka. Lebih jauh, kebijakan neoliberal juga dituding memperlebar jurang kemiskinan baik di tingkat domestik maupun di tingkat global. Penurunan upah buruh 40 hingga 50% yang diiringi dengan peningkatan biaya hidup yang mencapai 80% pasca penerapan *North America Free Trade Area* (NAFTA) di Mexico menjadi salah satu bukti kegagalan janji neoliberal (Internet). Dari data yang berhasil dikumpulkan oleh *Public Citizen*, NGO asal AS yang getol mengkritisi WTO, menunjukkan bahwa sejak WTO diberlakukan jumlah orang miskin yang hidup di bawah 1 dollar AS per hari meningkat tajam.

Berdasar beberapa analisis teoritis diatas maka peneliti menmbuat model analisis melalui pendekatan deskriptif analitis sebagai berikut:



D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam *booklet* Sarana dan Cara Imperialisme Barat di Bidang Ekonomi yang dikeluarkan Hizbut Tahrir (1998), dijelaskan Amerika menyebarkan ide tentang pembangunan ekonomi dan keadilan sosial untuk menggiring negara-negara baru merdeka masuk ke dalam cengkramannya. James Petras menyebut hal itu sebagai ekspansi penjajah (imperialist expansion) dalam wujud neoliberalisme dan globalisasi. Amerika mendorong pembangunan berbasis hutang hutang dan investasi asing di dunia ketiga. Dengan cara ini, Amerika menjebak mereka dalam perangkap hutang (*debt trap*) sehingga mudah didikte bahkan hingga “bertekuk lutut”.

Sebelum Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Amerika telah mengincar Indonesia, dalam bahasa David Ransom, Indonesia merupakan “hadiah yang terkaya bagi penjajah” di dunia. Presiden AS, Richard Nixon pernah

menyebut Indonesia sebagai “hadiah terbesar” di wilayah Asia Tenggara (Ransom: 2006). Sedangkan Presiden Lyndon Johnson menyatakan kekayaan alam Indonesia yang melimpah sebagai alasan Amerika mendekati dan “membantu” Indonesia.

Sementara itu tekanan beban hutang Orde baru mendorong pemerintah melakukan privatisasi sejumlah BUMN di pasar modal Indonesia dan internasional sejak tahun 1991 hingga 1997. Dana hasil privatisasi pada periode tersebut sebagian digunakan untuk membayar cicilan hutang pemerintah. Indonesia juga terlibat dalam liberalisasi perdagangan dan pasar bebas khususnya setelah bergabung dengan *World Trade Organization (WTO)*, *APEC*, dan *AFTA*.

Kebijakan neoliberal di Indonesia semakin tidak terkendali dengan masuknya IMF dalam penataan ekonomi sejak akhir 1997. Melalui kontrol yang sangat ketat, IMF memaksa Indonesia menjalankan kebijakan neoliberal, termasuk menalangi hutang swasta melalui BLBI dan merekapitalisasi sistem perbankan nasional yang tengah ambruk dengan biaya Rp 650 triliun. Momen ini juga dimanfaatkan Bank Dunia, ADB, USAID, dan OECD untuk meliberalisasi ekonomi Indonesia melalui program pinjaman yang mereka berikan.

Awal masuk neoliberalisme ke Indonesia, Industri pertambangan menjadi contoh paling tepat bagaimana ide-ide neo-liberal mulai diperkenalkan sejak awal orde baru. UU No.1/ 1967 tentang Penanaman Modal Asing menjadi titik masuk investasi asing di sektor ini. Pasal 8 UU No. 1/1967 menyebutkan “Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”. Kebijakan lebih rinci yang mendorong investasi di sektor ini adalah UU No.11/ 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Indonesia memperkenalkan Kontrak Karya (KK), model kontrak antara pemerintah dan perusahaan asing, yang dianggap paling liberal dalam dunia industri pertambangan. Kebijakan-kebijakan ini benar-benar merupakan cermin dari apa yang oleh Emel dan Huber menyebutnya sebagai mantera ‘*neo-liberal risk*’ di sektor pertambangan.

Freeport yang pertama kali memperoleh Kontrak Karya (KK) sekitar bulan April 1967 benar-benar memperoleh perlakuan istimewa dari pemerintah. Draft KK itu bukan dibuat oleh pemerintah Indonesia, tetapi sepenuhnya disiapkan sendiri oleh Freeport untuk kemudian disetujui. Moh. Sadli, salah seorang teknokrat yang diasosiasikan dengan ‘Mafia Berkeley’ mengatakan bahwa KK Freeport saat itu adalah bagian dari cara pemerintah untuk menarik investasi asing. Fakta lain, pemberian kontrak itu terjadi ketika status politik Papua masih belum jelas: apakah memilih bergabung dengan Indonesia atau mau merdeka melalui sebuah referendum, di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang akan dilakukan pada tahun 1969. Dan seperti kita ketahui, ternyata referendum dilakukan bukan berdasarkan prinsip ‘satu orang satu suara,’ sesuai ketentuan PBB, tetapi dilakukan oleh hanya 1.024 orang, yang berada di bawah pengawasan tentara. Pemerintah menganggap kendala fisik dan penduduk Papua yang primitif menjadi faktor penghalang untuk sebuah referendum yang melibatkan hampir 1 juta penduduk Papua saat itu. Tidak heran, di bawah akal-akalan pemerintah ini, hasil referendum menyatakan Papua bergabung dengan Indonesia.

Di bawah perlakuan yang istimewa terhadap Freeport (subsidiary of Freeport Sulphur Co, USA), investasi swasta asing berlomba-lomba masuk Indonesia. Setelah Freeport Indonesia memperoleh kontrak karya (KK) tahun 1967, maka hingga 1970

tercatat 9 perusahaan asing mengantongi KK dengan pemerintah Indonesia, dua di antaranya PT. Freeport dan PT. Inco. Dalam perkembangannya, Indonesia menjadi lahan subur bagi investasi asing, dan sebelum kejatuhan Soeharto, dianggap sebagai negeri yang paling menarik dari sisi investasi pertambangan di Asia. Nilai investasi KK, 1968 – 1990, mencapai USD 2,339 juta; tahun 1994 USD 861 juta dan; tahun 1997, USD 1, 922 juta. Pemain-pemain utama dalam industri pertambangan dunia hadir di Indonesia, seperti Rio Tinto, Newmont Gold Company, Newcrest Mining Ltd, Broken Hill Proprietary Company Ltd, Freeport McMoran Copper & Gold Inc, dan Inco Ltd. Tentu saja, itu semua berkat keuntungan yang melimpah ruah di bawah jaminan politik yang kuat.

Tetapi, harga yang harus dibayar dari neoliberalisasi di bidang ini juga sangat mahal. Konflik dan kekerasan muncul di mana-mana, di mana fungsi negara neoliberal dalam proses ini menjadi sentral untuk menjamin proses pengerukan mineral. Itu yang terjadi di Papua bertahun-tahun. Sebuah contoh, tahun 1977, dilaporkan bahwa Freeport mengalami kerugian sekitar USD 11 juta karena Organisasi Papua Merdeka (OPM) melakukan sabotase instalasi milik perusahaan itu. Menanggapi kasus ini ABRI/TNI melancarkan operasi Tumpas di daerah pegunungan dengan menggunakan pesawat buatan USA Bronco dan helikopter-helikopter yang dilengkapi senjata dengan target di darat. Serangan dilakukan dengan melakukan pengeboman di wilayah yang luas, serangan udara dengan manuver terbang rendah, dan menjatuhkan bom napalm di sekitar desa-desa di daerah pegunungan. Sehingga, kalau di kemudian hari, Freeport meraup keuntungan yang melimpah ruah, di mana seorang bos Freeport, James R. Moffet, di tahun 1999 – 2000 saja, memperoleh pendapatan senilai USD 8 juta dalam bentuk gaji, bonus, dan berbagai pendapatan tahunan lainnya, maka tidak lain, itu dialirkan melalui tumpahan darah.

Seperti juga di Freeport, penduduk-penduduk setempat terpaksa kehilangan tanah atau akses ke sumber daya alam lainnya dan menerima dampak pencemaran lingkungan akibat kebijakan pertambangan yang sangat liberal. Itu yang dialami oleh penduduk yang tinggal di sekitar Danau Matano, Sulawesi Selatan, setelah PT. Inco, anak perusahaan Inco Ltd., Kanada (saat ini Vale Inco, Brasil), memperoleh KK untuk mengeksplorasi biji Nikel di wilayah itu. Seperti Denise Leith yang menulis disertasi doktor tentang Freeport, disertasi doktor Katrin M Robinson tentang PT Inco juga menggambarkan bagaimana industri pertambangan yang memperoleh perlakuan istimewa pemerintah, menimbulkan sengketa tanah, pencemaran lingkungan, dan beragam pelanggaran hak asasi manusia. Tidak berlebihan, Robinson (1986) menulis bukunya tentang pertambangan PT Inco di Soroako, Sulawesi Selatan, di bawah judul '*Stepchildren of Progres.*'

Sengketa semacam terjadi meluas di berbagai industri berbasis sumber daya alam lainnya, seperti kehutanan, pekebunan dan sebagainya. Akar dari sengketa, karena semakin kuatnya negara melindungi hak-hak milik pribadi (private property ownership), dengan memberi jaminan kepada korporasi-korporasi swasta, dan dalam waktu yang sama tidak mengakui berbagai model kepemilikan para petani. Itu juga yang terjadi dengan berbagai proyek infrastruktur, terutama bendungan, yang didanai oleh lembaga-lembaga keuangan multilateral, atau badan-badan keuangan luar negeri lainnya.

Cengkraman Neoliberalisme makin kuat, ekspansi besar-besaran dalam industri perkebunan sawit di luar Jawa, yang mengantar Indonesia menjadi produsen utama *crude palm oil* (CPO) di dunia, menjadi contoh yang lain bagaimana paham neoliberal semakin menemukan kakinya. Dengan luas kebun sawit di tahun 1985 sekitar 600.000 hektar dan berkembang menjadi 4,1 juta hektar di tahun 2003, membuat Indonesia menjadi pemain penting dalam industri perkebunan sawit dunia, di belakang Malaysia. Pada tahun 2002, nilai ekspor produk-produk minyak sawit Indonesia mencapai USD 2,1 miliar.

Sektor ini juga mempekerjakan tenaga kerja secara langsung mencapai 800.000 orang dan 2 juta secara tidak langsung (Gelder, 2004). Tidak pelak lagi, ini merupakan buah dari kebijakan-kebijakan neoliberal di sektor ini: Bank Dunia memperkenalkan skema 'Kebun Inti dan Plasma' sejak 1990an; Sejak 1996, untuk mendorong sektor swasta pemerintah memberikan subsidi melalui pinjaman bank dengan tingkat suku bunga yang rendah; pengurangan pajak ekspor secara progresif untuk produk-produk minyak sawit seperti *crude palm oil* (CPO); *refined, bleached, deodorised* (RBD) *palm oil*; *crude olein*; dan RBD olein; pemberian izin untuk lahan perkebunan yang luas, termasuk konversi hutan-hutan alam sekitar 6 juta hektar (Casson 2002: 224-6; Larson, 1996; Colchester, et.al. N.D.:4). Sejak krisis 1997/8, IMF mendorong liberalisasi investasi perkebunan sawit, seperti tertuang dalam poin 39 Letter of Intent (LoI, 15 Januari 1998), yakni menghapus hambatan investasi asing di dalam industri perkebunan sawit.

Hal lain adalah peranan *Internasional Finance Corporation* (IFC), lembaga di bawah Bank Dunia, yang aktif mempromosikan ekspor hasil-hasil agrobisnis di Indonesia dengan menciptakan iklim investasi yang pro pasar. Tahun 2002, IFC menyediakan *stand-by equity* senilai USD 16.5 juta untuk PT Astra International dalam rangka restrukturisasi utang perusahaan itu. Seperti kita ketahui Astra adalah salah satu perusahaan raksasa yang juga memiliki perkebunan sawit yang menyebar di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, yang pada tahun 2004 memiliki areal perkebunan sawit yang telah ditanami seluas 189.970 hektar dengan kapasitas produksi CPO mencapai 543.635 ton per tahun.

Pertumbuhan fantastis industri kapitalis perkebunan sawit dalam masa belasan tahun terakhir berlangsung melalui praktek-praktek akumulasi primitif dengan pola-pola sebagai berikut. Pertama, konflik tanah menjadi hal paling menonjol karena klaim kepemilikan yang berbeda. Sebuah studi yang dilakukan Amzulian Rifai tentang 78 konflik antara petani dengan perusahaan-perusahaan perkebunan di Sumatra Utara menunjukkan konflik itu terjadi karena: lahan petani diambil secara ilegal dan paksa; tidak ada kompensasi yang dibayarkan untuk tanaman-tanaman di atas lahan yang masuk dalam areal konsesi; pohon-pohon karet yang dimiliki petani dirusak oleh perusahaan dengan cara membakar ketika melakukan pembersihan lahan dan; meski tanah-tanah petani terdapat dalam areal konsesi, tetapi mereka tidak memperoleh bagian keuntungan.

Kedua, mempekerjakan buruh-buruh murah (termasuk anak-anak dan perempuan) dengan kesehatan kerja yang buruk. Ini dimungkinkan karena sumber utama para pekerja adalah warga-warga miskin dari wilayah-wilayah padat penduduk di Jawa, Bali, NTT direkrut di bawah program perkebunan inti rakyat-transmigrasi (PIR-trans) dan (eks) petani setempat yang telah kehilangan tanah.

Ketiga, di balik proses itu, seperti biasa kekerasan menjadi bagian penting, ketika konflik antara perusahaan dan petani meningkat. Di Desa Salulebo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, propinsi yang baru dimekarkan dari Sulawesi Selatan, (14/2/2007), PT Astra Agro Lestari membayar milisi dan Brimob untuk menyerang Forum Aliansi Masyarakat Tani Mamuju, ketika sedang berada di lahan garapan mereka. Akibat serangan ini, seorang anggota milisi tewas, karena para petani memberikan perlawanan. Beberapa petani kemudian ditangkap polisi dan memperoleh penyiksaan selama dalam tahanan. Di Kampung Banjaran Kecamatan Secanggang, Kab. Langkat, Sumatera Utara (25/8/2008), aparat Polres Langkat melakukan penangkapan disertai tindak kekerasan terhadap 100 petani di area perkebunan sawit milik PT. Buana Estate, karena para petani berusaha mempertahankan tanah mereka yang telah diserahkan oleh pemerintah kepada perusahaan (Anonymous, N.D.b). Di Sumatra Barat, pertumbuhan perkebunan Sawit di daerah itu juga ditandai dengan kekerasan, ketika aparat polisi bersenjata mengintimidasi penduduk setempat untuk menyerahkan lahan mereka kepada PT Permata hijau Pasaman, anak perusahaan dari Wilmar sejak April 2000. Sebuah NGO di sana melaporkan itu dilakukan melalui intimidasi, penembakan, penculikan, penangkapan, dan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan.

Tampaknya, kekerasan bukan hanya monopoli industri perkebunan sawit. Seperti terjadi di Bulukumba, Sulawesi Selatan (21/3/2003), konflik tanah antara PT London Sumatra (LonSum) dengan petani setempat, karena ekspansi kebun karet berlangsung berdarah-darah. Pasukan Brimob secara sewenang-wenang memukuli dan menembaki petani yang berusaha merebut tanah mereka kembali. Akibat tindakan kekerasan ini empat orang meninggal dunia, banyak orang menderita luka-luka, 14 orang dimasukkan ke penjara, dan sejumlah aktivis pro-demokrasi yang mendampingi perjuangan rakyat Bulukumba, terpaksa 'tiarap' karena dimasukkan di daftar pencarian orang.

Bagaimana kekerasan seperti ini harus dijelaskan? Pandangan umum melihatnya sebagai problem aparat keamanan, yang selain dianggap 'haus darah,' juga 'haus uang.' Para komandan pasukan mengerahkan anak buahnya melindungi perusahaan, karena memperoleh pelayanan dari perusahaan. Setelah reformasi, cerita-cerita semacam ini terjadi di mana-mana, terutama dalam industri perkebunan dan pertambangan. Misalnya, harian *New York Times*, dalam sebuah laporan menyebut bahwa antara 1998 – 2004, Freeport menyatakan telah menyerahkan uang sekitar USD 20 juta kepada para jenderal, kolonel, mayor, dan kapten baik TNI maupun polisi. Para komandan menerima puluhan ribu dolar, dan dalam sebuah kasus memperoleh sekitar USD 150,000 (Perlez & R. Bonner, 2005). Pembayaran seperti itu terus saja berlangsung, dan di tahun 2008, perusahaan membayar sekitar USD 1,6 juta kepada aparat keamanan (Anonymous (N.D.c)). Kepada *New Times*, perusahaan menyatakan:

“There is no alternative to our reliance on the Indonesian military and police in this regard.... The need for this security, the support provided for such security, and the procedures governing such support, as well as decisions regarding our relationships with the Indonesian government and its security institutions, are ordinary business activities” (Perlez dan Bonner, 2005).

Relasi seperti ini selalu dipandang sebagai masalah ‘*governance*,’ baik di tingkat perusahaan maupun di jajaran pemerintah. Tentu saja, pandangan seperti ini bersifat reduksionis, karena hanya melihatnya sebagai bentuk-bentuk pelanggaran HAM dan korupsi oleh aparat kekerasan negara, apalagi biasanya berakhir dengan menjadikan serdadu-serdadu berpangkat rendah sebagai kambing hitam. Lebih dari itu, masalah ini harus dilihat sebagai sesuatu yang tertanam di dalam jantung sistem kapitalis, yakni keharusan untuk melindungi proses-proses penumpukan kekayaan swasta. Dengan kata lain, di sinilah letak relevansi kritik terhadap neoliberalisme, di mana pengerahan pasukan secara resmi sejatinya bertujuan melindungi super profit yang diperoleh perusahaan-perusahaan swasta.

Bahaya Neoliberalisme Di Indonesia, penerapan neoliberalisme yang dimulai semenjak berkuasanya pemerintahan orde baru hingga saat ini tentunya telah menimbulkan banyak perubahan yang berdampak terhadap perekonomian bangsa. Berikut adalah sejumlah data yang berhasil penulis himpun dari berbagai sumber:

1. Di masa Raffles (1811) pemilik modal swasta hanya boleh menguasai lahan maksimal 45 tahun; di masa Hindia Belanda (1870) hanya boleh menguasai lahan maksimal selama 75 tahun; dan di masa pemerintahan saat ini (UU 25/2007) pemilik modal diperbolehkan menguasai lahan selama 95 tahun. Teritorial Indonesia (tanah dan laut) telah dibagi dalam bentuk Kontrak Karya Migas, Kontrak Karya Pertambangan, Hak Guna Usaha Perkebunan, dan HPH Hutan. Total 175 juta hektar (93% luas daratan Indonesia) milik pemodal swasta/asing (Sumber : Insitut Global Justice (IGJ)).
2. Sebanyak 85% kekayaan migas, 75% kekayaan batubara, 50% lebih kekayaan perkebunan dan hutan dikuasai modal asing. Hasilnya 90% dikirim dan dinikmati oleh negara-negara maju. Sementara China tidak mengekspor batubara, (Sumber : SD-IGJ).
3. Beberapa tahun terakhir Indonesia telah impor 1,6 juta ton gula, 1,8 juta ton kedelai, 1,2 juta ton jagung, 1 juta ton bungkil makanan ternak, 1,5 juta ton garam, 100 ribu ton kacang tanah, bahkan pernah mengimpor sebanyak 2 juta ton beras (Sumber : RR).
4. Penerimaan negara dari mineral dan batubara (minerba) hanya 3 persen (21 trilyun pada tahun 2006).
5. Disepakati kontrak penjualan gas (LNG) ke luar negeri dengan harga antara tiga hingga 4 dollar Amerika/mmmbtu. Padahal saat kontrak disepakati harga pasar internasional US\$ 9/mmmbtu (Sumber : TSE).
6. Dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, orang miskin di negeri ini tahun 2006 berjumlah 39 juta (pendapatan perhari 5.095,-) Tapi kalau memakai standar Bank Dunia/standar internasional US\$ 2 per hari, maka orang miskin di Indonesia lebih kurang 144 juta orang (65%)(Sumber : FB).
7. Sampai saat ini kebutuhan daging sapi nasional sekitar 400 ribu ton (1,8 juta ekor sapi). Dari jumlah tersebut baru bisa dipenuhi kurang lebih sebesar 65%. kekurangannya diimpor dari Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Kanada, Irlandia, dan Brazil. Pemerintah mencanangkan swasembada daging sapi thn 2014. tapi yang terjadi sejak tahun 2010 adalah serbuan daging sapi impor, sapi siap potong impor, daging sapi beku impor yang menghantam usaha peternakan rakyat. Tak tergambar bagaimana program

- untuk merealisasikan swasembada daging tersebut secara gamblang. Tak beda dengan impor kedele, jagung, kacang tanah, gula dan yang lainnya yang berujung pada tidak diberdayakannya secara optimal kemampuan petani/peternak utk mengisi pasar dalam negeri guna menghadapi kebiasaan impor yang hanya menguntungkan segelintir pengusaha /kapitalis.
8. Hutang Luar Negeri Indonesia (Pemerintah dan Swasta) sebesar dua ribu lima ratus trilyun rupiah (2.500.000.000.000.000). Bunga dan cicilan pokok 450 trilyun. Pertumbuhan ekonomi 4 – 6 % per tahun hanya untuk biaya bunga dan cicilan pokok hutang luar negeri. Sebuah sumber menyebut negara telah bangkrut secara akuntansi karena hutang lebih besar dari assets.
 9. Empat puluh tahun lalu pendapatan rakyat Asia Timur rata-rata sebesar US\$ 100, bahkan China cuma US\$ 50. Kini Malaysia tumbuh 5 kali lipat lebih besar dari pendapatan Indonesia, Taiwan (16 kalilipat), Korea (20 kalilipat), China (1,5 kalilipat) dan telah jadi raksasa ekonomi, politik, dan militer di ASIA.
 10. Ekonomi Indonesia hanya dikendalikan oleh 400-an keluarga yang menguasai ribuan perusahaan Sejak Orde Baru mereka dapat monopoli kredit murah, perlindungan tarif, kuota, dan sebagainya. Semua itu karena mereka memberi upeti kepada penguasa.
 11. Dengan iming-iming pinjaman US\$ 400 juta dari *the World Bank*, Undang-Undang Migas harus memuat ayat: *Indonesia hanya boleh menggunakan maksimal 25% hasil produksi gas-nya*. Bayangkan, kita eksportir gas terbesar di Asia, tapi penggunaan gas-nya diatur dari luar. Akibatnya PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Asean Aceh Fertilizer, tutup karena kekurangan pasokan gas.
 12. Dugaan kekayaan negara yang hilang sia-sia: a) . Dengan memakai asumsi Prof. Soemitro 30% bocor, maka kalau APBN 2007 sebesar 750 trilyun, maka bocornya lebih kurang 250 trilyun. b). Penyelundupan kayu/pencurian hasil laut, pasir, dan lain-lain 100 trilyun. c). Potensi pajak yang tidak masuk kas negara tahun 2002 (menurut Kwik Kian Gie) sekitar 240 trilyun kalau sekarang misalnya dua kali lipat, maka angkanya berkisar 500 trilyun. d). Subsidi ke bank yang sakit menurut Kwik 40 trilyun tahun 2002. Maka secara kasar potensi pendapatan negara yang hilang sia-sia totalnya 890 trilyun. Itulah salah satu sebab rakyat tetap miskin, segelintir orang mahakaya, dan negara tertentu kecipratan menjadi kaya.
 13. Tahun 2003 BUMN Indosat dijual ke TEMASEK SINGAPURA dengan harga 5 triliun. Selama kurang lebih 5 tahun TEMASEK telah meraup keuntungankurang lebih 5 triliun laba dari bisnis telekomunikasi tersebut. Artinya secara kasar modal sudah kembali. Tahun 2008 TEMASEK menjual Indosat ke QATAR TELECOM senilai 16 triliun. Itu keuntungan mutlak hanya dalam 5 tahun dari perusahaan Singapura. (Sumber : Penelusuran di internet).
 14. Indonesia adalah eksportir sawit terbesar di dunia. namun sebagian besar kebun sawit adalah milik pengusaha Malaysia. Pabrik olahan sawitnya dibangun di Malaysia dan Singapura, padahal sawit mempunyai 38 produk turunan (bahkan ada yang menyebut 100 an lebih). Indonesia tidak mendapat

- nilai tambah dari sawit tetapi justru yang terjadi adalah paradox/ketimpangan besar antara pengusaha dengan rakyat yang hidup di sekitar perkebunan (A.Prasetyantoko,FTW,Agsts 2010).Di MalaysiaTKI dieksploitasi sebagai “budak”(ada 50ribuan anak anak TKI yang tdk sekolah di Sabah), di Tanahair sendiri jadi kuli di kebun orang Malaysia.
15. Sejak 1998 sd 2009 lebih kurang 474 undang-undang telah disahkan. Yang paling menyedihkan adalah UU bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Ciri umum UU tsb adalah ; 1. Hilangnya campurtangan negara dalam perekonomian dan diserahkan pada mekanisme pasar. 2. Penyerahan kekuasaan pada modal besar/asing dalam rangka ekspansi dan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia.3.Perlakuan diskriminatif terhadap mayoritas usaha rakyat(Sumber : IGJ<April 2010). Tidak heran karena biaya amandemen UUD 45 dan pembuatan UU dibiayai UNDP, NDI, BANK DUNIA, Bank Pembangunan Asia (ADB), USAID total \$ US 740 juta.
 16. Di satu sisi APBN dalam 5 tahun terakhir meningkat 100%. Sumbngan dari pajak 70%, khusus dari PPH dan PPN significant. Tapi subsidi terus menurun dari 23,69% tahun 2005 menjadi 14,29% tahun 2010(Sumber ; SD-IGJ). Padahal kenaikan APBN seharusnya makin memperkuat BASIS KEBIJAKAN EKONOMI KERAKYATAN/ NASIONAL. bukan malah memberi stimulus fiscal (73 triliun tahun 2009 dan 60 triliun tahun 2010) kepada sektor swasta/asing. Pencabutan subsidi listrik/kenaikan TDL (yang sangat memberatkan rakyat!) misalnya bukankah salah satunya karena ingin mengakomodir kepentingan perusahaan perusahaan asing yang ingin investasi di sektor kelistrikan.
 17. Struktur sektor perbankan secara umum tlah dikuasai asing. Bank yg dominan saham asing ; DANAMON (68,83%), BUANA (61%), UOBI (100%), NISP (72%), OCBC (100%), CIMB NIAGA (60, 38%) BII (55,85%), BTPN (71,6%). Meskipun masih minoritas tapi BANK PANIN dan PERMATA masing masing telah dikuasai asing dengan 35% dan 44,5%. Tahun 2011 akan dijual/privatisasi 10 BUMN, termasuk MANDIRI dan BNI. Selama 5 thn (2004- 2009) kredit bank asing hanya menngucurkan 19,34% dan sekarang cenderung turun di bawah bank pemerintah/swasta nasional.

E. KESIMPULAN

Strategi pemulihan ekonomi yang diterapkan pemerintahan Indonesia pasca Soeharto sampai dengan saat ini di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sampai saat ini belum menampakkan hasil yang seperti dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan yang lebih jauh banyak kalangan yang menilai bahwa kebijakan ekonomi nasional lebih banyak dibimbing oleh paham-paham neoliberalisme. Dimana, kepentingan kesejahteraan masyarakat lebih berada dibelakang kepentingan elit-elit ekonomi nasional maupun para pemodal asing. Ide-ide neoliberalisme secara evolusioner telah berkembang sejak awal Orde Baru, dan berlangsung lebih cepat setelah keruntuhan regim Orde Baru. Hal ini bisa dilihat pada mata rantai kebijakan pro-pasar yang tidak putus sejak kejatuhan rezim

Soekarno hingga paska kejatuhan rezim Soeharto. Salah satu aspek paling menyolok dari perkembangan neoliberalisme di Indonesia adalah perkembangan industri-industri berbasis sumber daya alam, seperti yang sudah ditunjukkan dalam pertambangan dan perkebunan. Ekstraksi surplus dalam kedua industri ini berlangsung *massive* setelah liberalisasi investasi dan perdagangan, perlindungan terhadap hak-hak milik individu, dan termasuk penggunaan aparat bersenjata. Perpindahan rezim dari Orde Baru yang berwatak diktator ke rezim-rezim reformasi tidak punya arti apa-apa dilihat dari sisi hubungan antara negara dan modal. Fungsi kedua rezim sebagai pengurus kepentingan kaum borjuis tetap saja berlangsung, dengan melakukan apapun agar pengerukan kekayaan dapat terus bekerja.

REFERENCES

- Djafar Zainuddin. 1996. Teori Hubungan Internasional Memerlukan Paradigma Baru?. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Jones, Walter S. 1993. Logika Hubungan Internasional 2: Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional, dan Tatanan Dunia. Jakarta.
- Kegley, Charles W. and Eugene R. Wittkopf. 1989. World Politics: Trend and Transformation. The Transformation of the Political Economy: Perspective from the First World. 3rd edition. New York: MacMillan.
- Mansbach, Richard W., and Kristen L. Rafferty. 2008. Introduction to Global Politics. New York: Routledge.
- Mas'ood, Mohtar. (1998). "Liberalisme dalam Ekonomi Politik Internasional". Bahan Kuliah Ekonomi Politik Internasional, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL UGM. Yogyakarta.
- Mas'ood, Mohtar. (2002). "Tantangan Internasional dan Keterbatasan Nasional: Analisis Ekonomi-Politik tentang Globalisasi Neo-liberal". Pidato Pengukuhan Guru Besar UGM. Yogyakarta.
- Pronk, JP. 1993. Sedunia Perbedaan: Sebuah Acuan Baru dalam Kerjasama Pembangunan Tahun 1990-an. Batas-batas yang Memudar. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Public Radio International. 2012. World Power Battle for Influence over Central Asia. Terdapat di www.pri.org/stories/world/asia/tt-world-powers-battle-for-influence-over-central-asia-10888.htm. diakses tanggal 9 Maret 2013.